BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kota Bandung

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu di bangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama Tumenggung Wiraangunangung. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarangDayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6,yakni R.A Wiranatakusumah II (1794 – 1829) yang dijuluki "Dalem KaumI", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke pemerintahan HindiaBelanda, dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willern Daendels(1808 – 1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung tumur Jawa Timur (kira-kira 1000 km).Pembangunan jalan raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah priangan umumnya, Jalan Raya Pos mulai di bangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman – Jalan AsiaAfrika – Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya.Sekitar akhir tahun 1808 atau awal tahun 1809, bupati beserta rakyatnya pindah dari Krapyak mendekati lahan bakal ibukota baru. Mulamulabupati tinggal di

Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, kemudian pindah lagi ke kampur Bogor (Kebon Kawung,pada lahan gedung pakuan sekarang).

Bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampur Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti berapa lama kota Bandung dibangun.Akan tetapi kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain Bupati R.A Wiranatakuksumah IIadalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

Sejak Tanggal 1 oktober 1962 sebutan *gemeente* berubah menjadi *stads gemeente* yang berlangsung hingga akhir pemerintahan hindia-belanda pada masa pendudukan jepang (Maret 1924 - 14 agustus 1945) pemerintahan kota Bandung disebut Bandung Shi. Pada masa kemerdekaan, sebutan kota Bandung berubah-ubah sebagai berikut:

a. Haminte Bandung

Dari 24 April 1948 – 11 maret 1950 (masa Negara pasundan dibawah RIS)

b. Kota Besar Bandung

Sejak 15 agustus 1945

c. Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Berdasarkan UU NO.05 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah hingga tahun 1998

d. Pemerintahan Kota Bandung

Sejak tahun 1999-hingga sekarang

Tabel 1.1
Walikota Kota Bandung Tahun 1906-sekarang

No	Nama	Masa Jabatan
1.	E.A. Maurenbrecher	1906-1907
2.	R.E. Krijboom	1907-1908
3.	J.A. van Der Ent	1909-1910
4.	J.J. Verwijk	1910-1912
5.	C.C.B. van Vlenier dan	1912-1913
6.	B. van Bijveld	1913-1920
7.	B. Coops	1920-1921
8.	S.A. Reitsma	1921-1928
9.	B. Coops	1928-1934
10.	. Ir. J.E.A. van Volsogen Kuhr	1934-1936
11.	Mr. J.M. Wesselink	1936-1924

12.	N. Beets	1942-1945
13.	R.A. Atmadinata	1945-1946
14.	R. Siamsurizal Ir. Ukar Bratak	1946-1946
15.	R. Enoch	1949-1956
16.	R. Priatna Kusumah	1956-1966
17.	R. Didi Jukardi	1968-1971
18.	Hidayat Sukarmadijaya	1971-1976
19.	R. Otje Djundjunan	1971-1976
20.	H.Ucu Junaedi	1976-1978
21.	R. Husein Wangsaatmaja	1978-1983
22.	H. Ateng Wahyudi	1983-1993
23.	Wahyu Hamidjaja	1993-1998
24.	Aa Tarmana	1998-2003
25.	H..Dada Rosada	2003-sekarang

Sumber : www.bandung.go.id, November 2012

Tabel 1.2
Kronologi Peristiwa Sejarah Kota Bandung

Tahun	Peristiwa
1488	Bandung didirikan sebagai bagian dari Kerajaan Pajajaran
1799	Menjadi bagian dari Sumedang Larang diserahkan kepada Pemerintah Belanda dari Kompeni
1811	Dinyatakan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung
1906	Gemeente Bandoeng

1917	Burgemeester Van Bandoeng yang pertama
1926	Staadsgemeente Bandoeng
1942	Bandung Si
1945	Pemerintah Nasional kota Bandung
1949	Haminte Bandung
1950	Kota Besar Bandung
1957	Kotapraja Bandung
1966	Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung
1974	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

Sumber : www.bandung.go.id, November 2012

1.1.1 Wilayah Kota Bandung

Dari hanya sebuah desa kecil yang didirikan pada tahun 1810 “desa” Bandung telah berkembang menjadi sebuah kota yang luas. Wilayahnya bertambah luas dan penduduknya bertambah padat dari tahun ke tahun.

Luas Kota Bandung pada 1 April 1906 adalah 900 ha., menjadi 2.150 ha pada 12 Oktober 1917, 3.305 ha pada tahun 1945, 8.098 ha pada tahun 1949, dan akhirnya menjadi sekitar 16.730 ha pada 22 Januari 1987.

Perencanaan tata kota dan perluasan wilayah kota ditetapkan untuk pertama kali pada tahun 1930 oleh E.H. Karsten, yang memproyeksikan masa 25 tahun ke depan jumlah penduduk sebesar 750.000 orang (*Plan Karsten*).

Rencana Induk Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 memproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 1.665.000 orang dengan luas wilayah 8.096 ha pada tahun 2005. Revisi Rencana Induk tahun 1985 – 2005 yang dibuat pada tahun 1992, memproyeksikan jumlah penduduk sebanyak 2.509.448 orang pada tahun 2005 dengan luas wilayah sekitar 16.730 ha. Proyeksi jumlah penduduk tahun 2005 didasarkan pada jumlah penduduk

tahun 1991 sebanyak 2.096.463 orang dan laju pertambahan penduduk rata-rata di Kota Bandung.

Daya tarik Kota Bandung yang menjanjikan kemudahan dalam segi materi dan predikat kota Pendidikan, telah menyebabkan terjadinya arus urbanisasi dari daerah di sekitar Kota Bandung, bahkan dari luar Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung menjadi penuh sesak karena jumlah penduduknya melampaui besar angka yang diproyeksikan.

1.1.2 Visi dan Misi Pemerintahan Kota Bandung

VISI :

Untuk Merealisasikan keinginan, harapan, serta tujuan sebagaimana tertuang dalam visi yang telah ditetapkan, maka pemerintah bersama elemen seluruh masyarakat Kota Bandung harus memahami akan makna dari visi tersebut yaitu :

Pertama : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus bersih dari sampah, dan bersih praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), penyakit masyarakat (judi, pelacuran, narkoba, premanisme dan lainnya), dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral dan agama dan budaya masyarakat atau bangsa;

Kedua : Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang memberikan kemakmuran bagi warganya;

Ketiga : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang taat terhadap agama, hukum dan aturan ? aturan yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban kota .

Keempat : Kota Bandung sebagai Kota Jasa harus memiliki warga yang bersahabat, santun, akrab dan dapat menyenangkan bagi orang yang berkunjung serta menjadikan kota yang bersahabat dalam pemahaman kota yang ramah lingkungan.

Secara harfiah, Bermartabat diartikan sebagai harkat atau haraga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat kota yang dapat dijadikan teladan karena kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan dan kedisiplinannya.

Jadi kota jasa yang bermartabat adalah kota yang menyediakan jasa pelayanan yang didukung dengan terwujudnya kebersihan, kemakmuran, ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinan masyarakatnya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sangatlah rasional pada kurun waktu lima tahun kedepan diperlukan langkah dan tindakan pemantapan (revitalisasi, reaktualisasi, reorientasi dan refungsionalisasi) yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung beserta masyarakatnya serta didukung secara politis oleh pihak legislatif melalui upaya-upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah namun tetap ramah dalam meningkatkan akselerasi pembangunan guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

MISI :

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal yang religius, Yang mencakup pendidikan, kesehatan dan moral keagamaan.
2. Mengembangkan perekonomian kota yang adil, yang mencakup peningkatan perekonomian kota yang tangguh, sehat dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.
3. Mengembangkan Sosial Budaya Kota yang ramah dan berkesadran tinggi, serta berhati nurani, yang mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketenagakerjaan, meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga, pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.
4. Meningkatkan penataan Kota , yang mencakup pemeliharaan serta peningkatan prasarana dan sarana kota agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota .
5. Meningkatkan kinerja pemerintah kota secara professional, efektif, efisien akuntabel dan transparan, yang mencakup pemberdayaan aparatur pemerintah dan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem keuangan kota , mencakup sistem pembiayaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, swasta dan masyarakat.

1.1.3 Logo Pemerintahan Kota Bandung

Lambang kota Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota besar Bandung tahun 1953, tertanggal 8 Juni 1953, yang diijinkan dengan Keputusan Presiden tertanggal 28 april 1953 No. 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tertanggal 28 Agustus 1954 No. 4 lampiran No. 6

Lambang tersebut bertokoh PERISAI yang berbentuk JANTUNG. Perisai tersebut terbagi dalam dua bagian oleh sebuah BALOK- LINTANG mendatar bertajuk empat buah, yang berwarna HITAM dengan pelisir berwarna PUTIH(PERAK) pada pinggir sebelah atasnya :

Gambar 1.1
Logo Pemerintahan Kota Bandung



1. bagian atas latar KUNING (EMAS) dengan lukisan sebuah GUNUNG berwaarna HIJAU yang bertumpu pada blok-lintang daaan
2. bagian bawah latar PUTIH(PERAK) dengan lukisan empat bidaang jalur mendatar berombak yang berwarna BIRU.

Di bawah perisai itu terlukis sehelai PITA berwarna KUNING (EMAS) yang melambai pada kedua ujungnya, Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar latin berwarna HITAM amsal dalam bahasa KAWI, yang berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI.

Sebagai tokoh lambang itu diambil bentuk perisai atau tameng, yang dikenal kebudayaan dan peradaban sebagai senjata dalam perjuangan untuk mencapai sesuatu tujuandengan melindungi diri. Perkakas perjuangan yang demikian itu dijadikan lambang yang mempunyai arti menahan segala mara bahaya dan kesukaran.

KUNING (EMAS), berarti : kesejahteraan, keluhungan.

HITAM (SABEL), berarti : kokoh, tegak, kuat.

HIJAU (SINOPEL), berarti : kemakmuran sejuk

PUTIH (PERAK), berarti : kesucian

BIRU (AZUUR), berarti : kesetiaan

Gemah ripah wibawa mukti, berarti : tanah subur rakyat makmur

BenderaKota Bandung

Bendera yang digunakan oleh Kotamadya Bandung adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No. 9938/53.Bentuk bendera tersebut adalah seperti yang tercantum pada diktum Keputusan tersebut diatas sebagai berikut :

Gambar 1.2



Bendera Kota Bandung

1. Bendera yang dipergunakan oleh Kota Besar Bandung dan tiga bidang jalur mendatar, masing -masing berturut-turut dari atas kebawah berwarna HIJAU, KUNING dan BIRU
2. Perbandingan-perbandingan antara lebarnya dan jalur-jalur tersebut dibawah huruf A urutan dari atas kebawah adalah 2:1:2.
3. Perbandingan antara panjang dan lebarnya berbeda itu 7:5

1.2 Sejarah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung

BAKOMINFO Kota Bandung merupakan Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007, Tanggal 4 Desember 2007 serta merupakan penggabungan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Dinas dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yaitu Dinas Informasi dan Komunikasi dengan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE). Dengan demikian Bakominfo berdiri sejak diberlakukannya PERDA Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung. Dengan diterbirkan dan berlakunya Perda Kota Bandung Nomor : 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung Tanggal 7 Agustus 2009, maka Badan Komunikasi dan

Informatika Kota Bandung menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kota Bandung.

1.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan pembantuan.

FUNGSI :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan hubungan masyarakat;
2. Pembinaan dan pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan yang meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi, desiminasi informasi dan teknologi informasi serta hubungan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif Dinas, dan
4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung

VISI :

Terwujudnya efektifitas dan efisiensi komunikasi dan informatika penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kota bandung sebagai kota jasa **bermartabat**.

MISI :

- Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan, pemberdayaan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika;
- Meningkatkan layanan publik dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan komunikasi dialogis;
- Meningkatkan pelayanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya masyarakat berbasis teknologi informasi;
- Meningkatkan kerjasama, kemitraan dan pemberdayaan lembaga komunikasi dan informatika pemerintah dan masyarakat;
- Mendorong peran media massa dalam rangka meningkatkan informasi yang beretika dan bertanggungjawab;
- Meningkatkan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang handal.

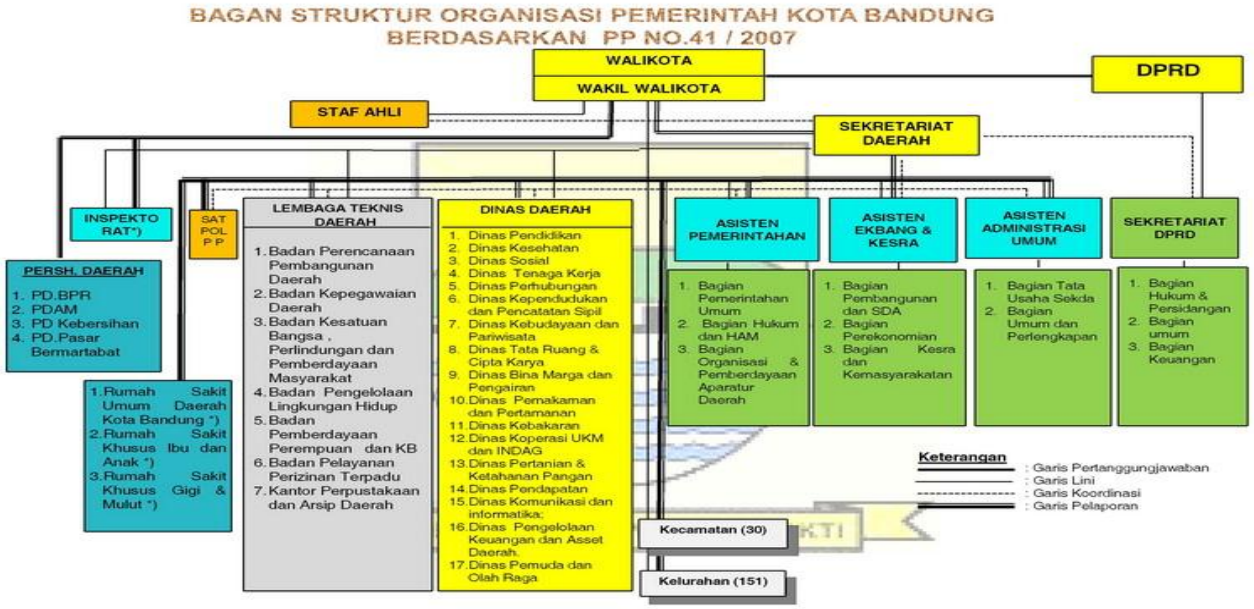
1.3 Struktur Pemerintahan Kota Bandung dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Bandung

1.3.1 Struktur Pemerintahan Kota Bandung

Struktur organisasi merupakan suatu landasan organisasi structural dapat dilaksanakan dengan baik guna menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi dalam sebuah organisasi sangatlah penting. Hal ini karena berkaitan dengan sistem birokrasi dari perusahaan tersebut.

struktur organisasi ini bertujuan agar sistem birokrasi perusahaan bisa berjalan dengan baik dan juga teratur. Pemerintahan Kota Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bandung



: Sumber: Arsip Pemerintahan Kota Bandung

1.3.2 Struktur DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung

Dalam menunjang kelancaran dinas komunikasi dan informatika pemerintahan kota bandung maka diperlukan suatu struktur organisasi.

Seperti yang tertulis pada perda kota Bandung No.13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Daerah Kota Bandung.

Berikut ini adalah struktur organisasi pada Dinas komunikasi dan informasi Kota Bandung:

A. Kepala dinas

B. Sekreteriat membawahi:

1. Sub bagian umur dan kepagawaian

2. Sub bagian keuangan dan program

C. Bidang Pos dan Telekomunikasi yang membawahi:

1. Seksi Pengandalian Pos dan Telekomunikasi

2. Seksi Pemberdayaan dan Telekomunikasi

D. Bidang Telematika yang membawahi:

1. Seksi sarana dan prasarana Telematika

2. Seksi *e-government* dan Pemberdayaan Telematika

E. Bidang diseminasi informasi yang membawahi:

1. Seksi Peliputan data dan Informasi

2. Seksi kemitraan Media dan Publikas

F. Bidang Hubungan Masyarakat,membawahi:

1. Seksi Peliputan dan Komunikasi

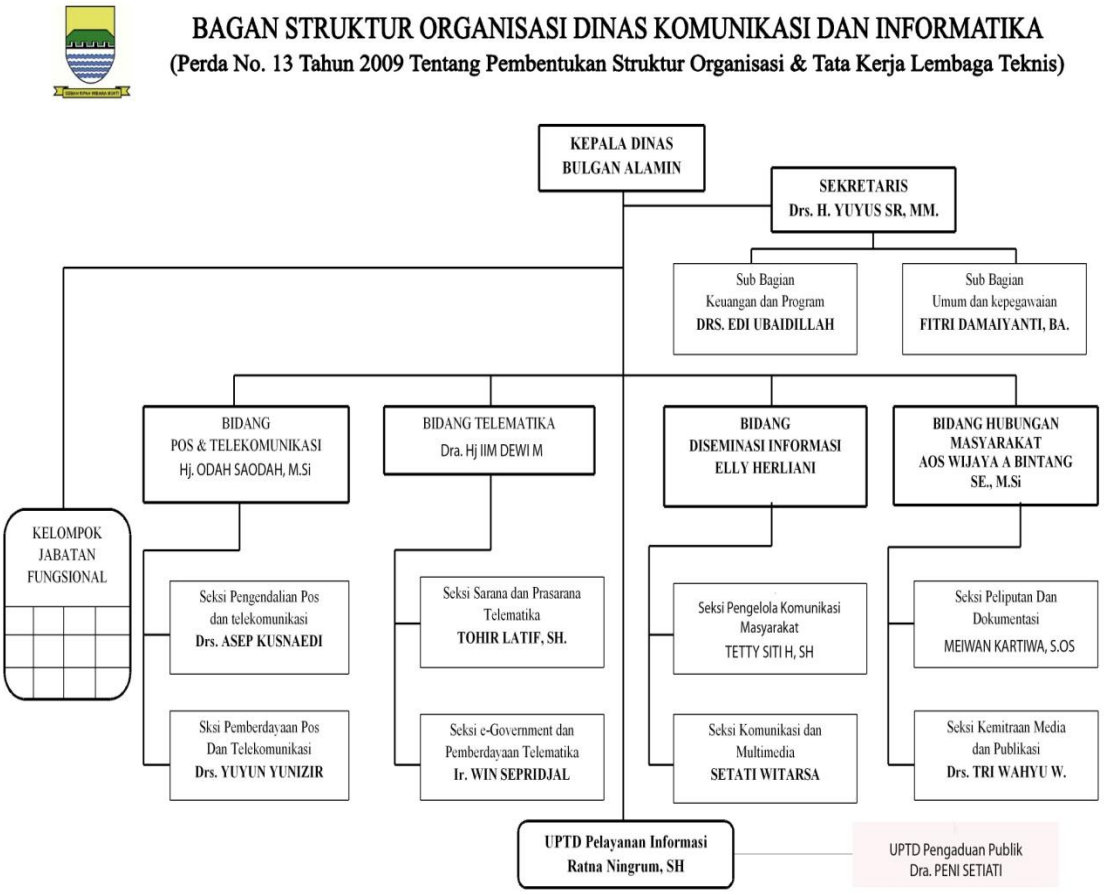
2. Seksi kemitraan Media dan Publikasi

G. Unit Pelaksanan Teknis Dinas

H. Kelompok Jabatan Fungsi Sosial

Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung:

Gambar 1.4
Struktur Organisasi DISKOMINFO Pemerintah Kota Bandung



: Sumber: Arsip Pemerintahan Kota Bandung

1.4 Job Deskription

- **Kepala Seksi Peliputan dan Dokumentasi**

Uraian tugas seksi peliputan dan Dokumentasi yaitu;

- ❖ Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja dibidang peliputan dan dokumentasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- ❖ Melaksanakan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan.
- ❖ Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan Penyempurnaan hasil kerja dan sebagai bahan penilaian kinerja bawahan.

- Memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan peliputan dan dokumentasi.
- Menyusun dan meyiapkan bahan laporan hasil pantauan dan evaluasi pelaksanaan peliputan dan dokumen
- Menyusun dan menyiapkan bahan koodinasi dan konsultasi pelaksanaan dan dokumentasi
- Memeriksa data untuk bahan kajian pengembangan peliputan dan dokumentasi
- Menyusun rencana kegiatan kerja dan memfasilitasi pembinaan peliputan dan dokumentasi sebagai media informasi
- Menyiapkan dan menyusun peliputan dan dokumentasi kegiatan hubungan masyarakat
- Menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi
- Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum di bidang seksi peliputan dan dokumentasi oleh pemimpin
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan pemerintahan kota bandung, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi
- Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi peliputan dan dokumentasi sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pemimpin.
- Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pemimpin.

Fungsi Seksi Peliputandan Dokumentasi yaitu:

- ❖ Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup peliputan dan dokumentasi.
- ❖ Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup peliputan dan dokumentasi.
- ❖ Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliput kegiatan eksekutif, legislative, konfrensi pers, press release.
- ❖ Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelengaraan peliputan dan dokumentasi.
- ❖ Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi.

- ➢ **Kepala Seksi Kemitraan dan Publikasi**

  Uraian tugas seksi kemitraan dan publikasi, yaitu:

  - ❖ Menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang kemitraan media dan publikasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
  - ❖ Menyiapkan bahan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilakanakan secara efektif dan efisien.
  - ❖ Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana dan program sebagai bahan penyempurnaan hasil kerja dan sebagai penilaian kerja bawahan.
  - ❖ Memeriksa data sebagai sebagai bahan kebikjaan kemitraan media dan pulikasi.
  - ❖ Menyusun dan meyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kemitraan meida dan publiksi
  - ❖ Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi serta fasilitas pembangunan kemitraan media dan publikasi.

- Memerikas/mengoreksi data untuk bahan kajian pengembangan kemitraan media dan pulikasi.
- Mengindentifikasi dan memfasilitas pembinaan kemitraan media dan publikasi sebagai media informasi
- Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi serta fasilitas pengembangan kemitraan.
- menyusun dan menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi.
- Menyiapkan bahan telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan umum di bidang seksi peliputan dan dokumentasi oleh pemimpin
- Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkungan pemerintahan kota bandung, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat untuk keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program
- Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program seksi peliputan dan dokumentasi sebagai bahan
- Melaksanakan tugas lainya yang diberikan oleh pemimpin

Fungsi Kemitraan Media dan Publikasi:

- Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup kemitraan media dan publikasi
- Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup kemitraan meida dan publikasi

- ❖ Pelaksanaan lingkup peliputan dan dokumentasi yang meliput pengembangan kemitraan meida skala kota, pemberdayaan dan pengembangan media elektronik dan cetak.
- ❖ Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup kemitraan media dan publikasi.

1.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Bandung

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Sarana Dinas Komunikasi dan Informatika			
1	Gedung	1	Baik
2	Ruang staff	11	Baik
3	Ruang Pimpinan	2	Baik
4	Ruang Tamu	1	Baik
5	Perpustakaan	1	Baik
6	Kantin	1	Baik
7	Mushola	2	Baik

8	Gudang	1	Baik
9	Dapur	1	Baik
10	Toilet	2	Baik
11	Lapangan Upacara	1	Baik
12	Lapangan Parkir	4	Baik

Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika			
1	Meja	1	Baik
2	Kursi	11	Baik
3	Lemari	2	Baik
4	Biling Kabinet	1	Baik
5	Komputer	1	Baik
6	Scanner	1	Baik
7	Printer	2	Baik
8	Telephone	1	Baik
9	Dispenser	1	Baik

1.6 Lokasi dan Waktu PKL

Nama Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung

Alamat : Jl. Wastukencana No. 2 Bandung

Telepon : 022-4234892

Waktu PKL : 09 Juli – 31 Juli 2012